

## **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PANDANARUM UNTUK MEWUJUDKAN SDGs EKOSISTEM DARATAN**

*(Pandanarum Village Community Empowerment to Actualize Sustainable Development  
Goals of the Terrestrial Ecosystem)*

Muhammad Reza Hudaya & Eka Zuni Lusi Astuti

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Gadjah Mada, Jl. Socio Justicia No. 1 Bulaksumur, Sleman, DI Yogyakarta, Indonesia;  
E-mail: mrezaahdy@gmail.com; ekazunilusiastuti@ugm.ac.id

Diterima 19 Desember 2019, direvisi 24 September 2020, disetujui 24 September 2020

### **ABSTRACT**

*Blitar Regency has a potential terrestrial ecosystem to improve community welfare. However, the government's low commitment to manage terrestrial ecosystem can cause environmental damage. For example, damage to the terrestrial ecosystem in Pandanarum Village due to deforestation has caused natural disasters such as floods, landslides, and air temperature rise. Not only in Pandanarum village, but also the surrounding villages were also affected by the disaster. This condition led to establish an environmental-loving community called Sahabat Menanam in year 2015. Sahabat Menanam is doing some efforts to overcome the terrestrial ecosystem damage in Pandanarum through community empowerment approach. This study aims to describe the efforts of Sahabat Menanam in empowering Pandanarum community, by using qualitative methods. Data was collected through participant observation, in-depth interviews, and documentation. The study shows that Sahabat Menanam has succeeded in empowering the Pandanarum community, which is demonstrated by an independent community through increasing knowledge and capacity to conserve terrestrial ecosystems. After the community becomes an independent society, efforts to conserve terrestrial ecosystems can be carried out in a sustainable manner by community elements themselves with or without intervention from Sahabat Menanam.*

*Keywords: Sahabat Menanam; community empowerment.*

### **ABSTRAK**

Kabupaten Blitar memiliki ekosistem daratan yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen pemerintah yang masih rendah untuk mengelola ekosistem daratan menyebabkan banyak terjadi kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, kerusakan ekosistem daratan di Desa Pandanarum akibat penggundulan hutan menyebabkan bencana alam banjir, tanah longsor, dan meningkatnya suhu udara. Tidak hanya Pandanarum, desa-desa di sekitarnya juga terdampak bencana. Kondisi tersebut mendorong lahirnya komunitas pecinta lingkungan bernama Sahabat Menanam pada tahun 2015. Sahabat Menanam berupaya mengatasi kerusakan ekosistem daratan di Pandanarum dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan upaya Sahabat Menanam dalam memberdayakan masyarakat Pandanarum. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Sahabat Menanam berhasil memberdayakan masyarakat Pandanarum yang ditunjukkan dengan kemandirian masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan kapasitas untuk melestarikan ekosistem daratan. Setelah tercapai kemandirian, upaya pelestarian ekosistem daratan mampu dilakukan secara berkelanjutan oleh elemen masyarakat dengan atau tanpa intervensi dari Sahabat Menanam.

Kata kunci: Sahabat Menanam; pemberdayaan masyarakat.

## I. PENDAHULUAN

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola untuk menjaga kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Bappenas, 2017). Poin 15 SDGs membahas tentang ekosistem daratan. Tujuannya adalah untuk membangun ekosistem daratan, yakni melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan; mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan; dan menghentikan kerusakan keanekaragaman hayati.

Pembangunan ekosistem daratan penting dilakukan karena berdampak langsung terhadap lingkungan hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti air, tanah, dan udara bersih menjadi hal utama yang dibutuhkan manusia. Beberapa dekade terakhir banyak terjadi kerusakan ekosistem daratan akibat ulah manusia seperti alih fungsi lahan, pembalakan liar, dan pencemaran lingkungan. Kerusakan ekosistem daratan dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup, baik karena terjadinya pencemaran maupun terkurasnya sumber daya alam yang dapat menimbulkan ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami (Rahman, 2015). Alasan ekonomi menjadi faktor penyebab tindakan tersebut. Oleh karena itu, selama kebutuhan ekonomi belum tercukupi maka perusakan lingkungan masih tetap dilakukan.

Di Kabupaten Blitar, kewenangan pengelolaan ekosistem daratan ada di tangan pemerintah, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Perhutani. Kedua instansi tersebut

memiliki tanggung jawab dalam mengelola ekosistem daratan khususnya hutan, sumber mata air, dan daerah aliran sungai (DAS). Upaya pemerintah masih belum mampu menyelesaikan persoalan ekosistem daratan seperti dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1 Luas lahan kritis Kabupaten Blitar  
*Table 1 Critical land area of Blitar Regency*

| Tahun ( <i>Year</i> ) | Luas ( <i>Area</i> ) (Ha) |
|-----------------------|---------------------------|
| 2013                  | 2.381                     |
| 2014                  | 2.381                     |
| 2015                  | 2.381                     |
| 2016                  | 17.481                    |
| 2017                  | 44.433                    |

Sumber (*Source*): Dishut Jatim, 2018.

Tabel 1 menunjukkan semakin meningkatnya luasan lahan kritis yang berarti kerusakan ekosistem daratan di Kabupaten Blitar semakin meningkat. Prihatin dengan kondisi tersebut, Sahabat Menanam, sebuah organisasi masyarakat sipil pecinta lingkungan, tergerak untuk mengatasi kerusakan ekosistem daratan di Kabupaten Blitar. Menurut Sahabat Menanam, pembangunan ekosistem daratan membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Upaya ini merupakan bentuk mobilisasi sumber daya yang tidak hanya berbentuk interaksi antara gerakan dan otoritas yang diterima tetapi juga dengan langkah-langkah strategis (Suwarno, 2016).

Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah strategis yang ditempuh Sahabat Menanam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem daratan. Sahabat Menanam memfasilitasi masyarakat agar mandiri sehingga memiliki posisi tawar di samping pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan ekosistem daratan. Tujuannya adalah mendorong sinergitas antar-aktor pembangunan untuk mewujudkan SDGs pembangunan ekosistem daratan. Berawal dari situ dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana proses Sahabat Menanam

memberdayakan masyarakat Pandanarum dapat mandiri melestarikan ekosistem daratan.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan selama bulan Juli-Agustus 2019 di Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Desa Pandanarum dipilih karena merepresentasikan pembangunan ekosistem daratan di kawasan pegunungan, terutama pada upaya rehabilitasi hutan dan sumber mata air melalui pemberdayaan masyarakat.

### B. Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan metode kualitatif untuk menggali proses pemberdayaan masyarakat dalam membangun ekosistem daratan di Desa Pandanarum. Secara bertahap penulis berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengelompokkan objek studi (Patilima, 2005). Informan dalam penelitian ini yaitu pengurus Sahabat Menanam sebanyak tiga orang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, Wakil Kepala Administratur KPH Perhutani Blitar, dan tiga orang anggota kelompok masyarakat Desa Pandanarum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasanah (2016) menjelaskan bahwa observasi partisipan dilakukan dengan cara mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi untuk mengeksplorasi subjek. Wawancara digunakan untuk menggali informasi yang terlihat mata dan juga informasi yang tersembunyi di balik diri subjek penelitian (Subadi, 2006). Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011).

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat menurut Soetomo. Soetomo (2011) menjelaskan bahwa pemberdayaan sebagai proses yang bertujuan pada transformasi masyarakat. Transformasi yang dimaksud adalah perubahan kondisi ketidakberdayaan masyarakat menjadi masyarakat mandiri dalam mengupayakan kesempatan dan wewenang untuk mengelola pembangunan di samping aktor lain yang dalam hal ini adalah pemerintah.

Soetomo (2011) menjelaskan ada beberapa proses yang dilalui untuk menciptakan kemandirian masyarakat, yaitu:

1. *Bottom-up*, menempatkan strategi pembangunan yang berasal dari bawah yakni perumusan terkait program ditentukan oleh identifikasi masalah dan kebutuhan dari dan oleh masyarakat.
2. *Social inclusion*, diwujudkan melalui upaya perubahan pola relasi sosial dalam struktur sosial masyarakatnya. Asumsinya adalah dorongan perubahan struktural mampu menghilangkan diskriminasi institusional pada seluruh lapisan masyarakat terhadap akses dan partisipasi.
3. Variasi lokal, didasarkan pada potensi dan permasalahan yang berbeda di masyarakat. Dengan demikian, pola pelaksanaan pembangunan masyarakat yang cocok dan berhasil diterapkan dalam masyarakat tertentu, tidak ada jaminan berhasil di masyarakat lain yang kondisinya berbeda.
4. Proses belajar, dijelaskan sebagai proses pengembangan kapasitas masyarakat. Dalam pemberdayaan, masyarakat diposisikan sebagai subjek yang harus mampu melaksanakan kewenangan pengelolaan pembangunan.
5. Pembagian akses, dimaksudkan sebagai pelimpahan kesempatan

kepada masyarakat untuk melakukan pengambilan keputusan dalam pembangunan sejak tahap identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, hingga pelaksanaan.

6. Keberlanjutan, muncul dari asumsi mekanisme *top down* yang menimbulkan ketergantungan akibat kebiasaan menunggu program dari pemerintah. Oleh karena itu, intervensi terkait inisiatif dan kreativitas dilakukan untuk memunculkan kemandirian masyarakat
7. *Transformation*, sebagai tujuan perubahan pada kondisi masyarakat yakni dari ketidakberdayaan menjadi masyarakat berdaya.

#### D. Analisis Data

Penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian melalui data yang dikumpulkan (Sugiyono, 2011). Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan dan setelah pengumpulan temuan lapangan. Hasil wawancara, observasi partisipan, dan dokumentasi ditriangulasikan sehingga menghasilkan kesimpulan berdasarkan kategorisasi data. Setelah didapatkan

kesimpulan, temuan dituliskan secara deskriptif yang diinterpretasikan dari konsep pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Soetomo dan konsep SDGs poin 15 tentang ekosistem daratan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Lemahnya Fungsi Pemerintah

Sumber daya manusia yang dimiliki KPH Blitar tidak sebanding dengan luas wilayah hutan di Kabupaten Blitar. KPH Blitar hanya memiliki 12 personel Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) untuk mengawasi hutan di KPH Blitar seluas 57.000 hektare yang terbentang dari daerah Kalipare, Malang hingga Popoh, Tulungagung. Dengan demikian maka satu personel bertugas menjaga wilayah seluas 4.750 hektare. Ketimpangan yang begitu tinggi membuat komposisi perbandingan tanggung jawab pengawasan dan pengamanan hutan setiap Polhutmob menjadi tidak ideal (Suara.com, 2016). Akibat, pembalakan liar dan alih fungsi lahan terjadi begitu masif.

Gambar 1 memperlihatkan kawasan hutan lindung yang berubah menjadi lahan kosong di kawasan pegunungan di atas



Sumber (Source): Dok. Sahabat Menanam, 2019.

Gambar 1 Lahan kritis di Hutan Lindung Blitar Selatan  
*Figure 1 Critical land in South Blitar Protected Forest.*

Desa Pandanarum. Alih fungsi hutan untuk komoditas tanaman semusim seperti tebu dan jagung menjadi penyebabnya. Setiap memasuki masa panen, kondisi kritis kawasan hutan terlihat jelas. Tidak ada tanaman keras untuk menyangga air tanah sehingga terjadi banjir dan tanah longsor pada musim penghujan. Hal ini menjadi latar belakang *civil society* (kelompok masyarakat), khususnya Sahabat Menanam dan Masyarakat Desa Pandanarum untuk berkontribusi menyelesaikan persoalan ekosistem daratan.

## B. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan ekosistem daratan di Desa Pandanarum tidak serta-merta dilakukan, melainkan melalui proses fasilitasi dan pendampingan oleh Sahabat Menanam hingga masyarakat menjadi mandiri. Proses pemberdayaan dilakukan sejak tahun 2015 hingga sekarang. Proses pemberdayaan diilustrasikan pada Tabel 2.

Banyak proses yang dilalui hingga masyarakat mandiri melakukan pembangunan ekosistem daratan. Untuk mencapai kemandirian, Sahabat Menanam menerapkan aspek-aspek berikut dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

### 1. Pendekatan Berbasis Masyarakat Akar Rumput

Sahabat Menanam memulai pembangunan ekosistem daratan di Kabupaten Blitar pada tahun 2015. Tindakan ini berawal dari kelemahan pengelolaan ekosistem daratan oleh

Pemerintah Kabupaten Blitar sehingga Sahabat Menanam berinisiatif melakukan upaya penyelesaian masalah ekosistem daratan. Upaya tersebut diawali dengan melakukan gerakan lingkungan penanaman bakau di Pantai Pasur. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan ekosistem daratan dari pemerintah dan masyarakat. Aksi tersebut berhasil dan Pemerintah Kabupaten Blitar akhirnya turun tangan. Pada tahun-tahun setelahnya, mulai muncul upaya penanganan lahan kritis di berbagai desa oleh pemerintah maupun masyarakat.

Di Desa Pandanarum, inisiasi pembangunan ekosistem daratan muncul dari keresahan dan kepedulian masyarakat. Masyarakat berkeinginan untuk melakukan upaya mandiri tanpa terhambat birokrasi.

*“Ada kerusakan lingkungan di sini, banyaknya pembalakan liar mengakibatkan gundulnya hutan. Tidak bisa dipungkiri, masyarakat terpaksa mencuri kayu hutan karena desakan ekonomi. Selain itu, kondisi sepanjang jalan Pandanarum yang gersang menjadi masalah bertambahnya suhu panas di daerah sini”.* (Wawancara dengan Wira Sentosa – Sekretaris LMDH Pandanarum, 8 Agustus 2019).

Ada keinginan dari masyarakat Pandanarum untuk memperbaiki ekosistem daratan di daerahnya. Keinginan tersebut muncul setelah adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat berupa cuaca panas, rawan banjir, dan tanah longsor akibat kondisi ekosistem daratan yang kritis. Masyarakat Pandanarum kemudian meminta fasilitasi Sahabat Menanam dalam pembangunan ekosistem daratan. Fasilitasi

Tabel 2 Tahap pemberdayaan masyarakat Pandanarum  
*Table 2 Pandanarum community empowerment phase*

| Tahun ( <i>Year</i> ) | Kegiatan ( <i>Activities</i> )  |
|-----------------------|---|
| 2015                  | Sosialisasi dan koordinasi penyelesaian persoalan ekosistem daratan                                     |
| 2016                  | – Reboisasi di pinggir jalan desa<br>– Peningkatan kapasitas melalui Program Sekolah Petani             |
| 2017                  | – Reboisasi di kawasan hutan lindung dan lereng pegunungan<br>– Monitoring dan evaluasi hasil penanaman |
| 2018                  | Reboisasi di sumber mata air  |
| 2019                  | Kemandirian masyarakat melakukan reboisasi di lahan-lahan kritis desa melalui Program Adopsi Pohon      |

yang dilakukan cukup unik karena dilakukan secara informal dan egaliter. Sahabat Menanam masuk ke dalam forum-forum warga, perlahan mengarahkan obrolan terkait kelestarian ekosistem daratan. Hal ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan. Upaya demikian mampu mendorong rasa tanggung jawab masyarakat terhadap lahan kritis di daerahnya.

## 2. Melibatkan Masyarakat Secara Inklusif

Burchardt, Le Grand, & Piachaud (2002) menyatakan ada empat aspek yang dapat diidentifikasi dari proses inklusi sosial yakni aspek konsumsi (*consumption*) ketika individu memiliki kekurangan kapasitas untuk membeli barang dan jasa; aspek produksi (*production*) yakni ketika individu tidak mampu mengakses pekerjaan; aspek keterlibatan (*involvement*) yakni partisipasi individu dalam diskursus organisasi dan politik nasional; aspek interaksi sosial (*social interaction*) dengan dukungan keluarga dan kelompok.

Keterlibatan dalam pembangunan ekosistem daratan tidak sepenuhnya mencakup keseluruhan elemen masyarakat lokal. Dalam setiap kegiatan pembangunan ekosistem daratan di manapun, Sahabat Menanam tidak memaksa dan mewajibkan masyarakat untuk ikut. Sahabat Menanam hanya mengajak dan menanamkan kesadaran kepada masyarakat lokal, terlepas masyarakat mengikuti atau tidak.

*“Keterlibatan masyarakat sebenarnya terbatas yang tahu Sahabat Menanam. Partisipasi terbesar dari karang taruna sama LMDH, untuk masyarakat di luar itu belum. Banyak warga yang cenderung*

*acuh terhadap Sahabat Menanam karena banyak juga organisasi yang masuk di Pandanarum”.* (Wawancara dengan Masudin Harun – Kepala Desa Pandanarum, 12 Agustus 2019).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekosistem daratan di Desa Pandanarum lebih banyak dari karang taruna dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kecenderungan masyarakat yang minim kesadaran terhadap kelestarian lingkungan menyebabkan masyarakat yang sering berkontribusi hanya terbatas pada orang-orang dengan kepedulian melestarikan lingkungan. Akan tetapi, dengan kelompok yang sudah memiliki kesadaran tersebut, pembangunan ekosistem daratan mampu dilakukan secara rutin hingga saat ini.

## 3. Memperkuat Variasi Lokal dalam Pembangunan

Variasi pembangunan ekosistem daratan sampai saat ini sebatas penanaman sesuai karakteristik kawasan. Pembangunan ekosistem daratan difokuskan di kawasan lereng gunung, tepi jalan, sumber mata air, dan hutan lindung. Sahabat Menanam membagi tanaman menjadi tiga kategori yaitu tanaman perintis, tanaman produktif, dan tanaman hias. Tanaman perintis bertujuan sebagai tanaman penyangga ekosistem, yakni yang memiliki manfaat secara ekologi mengikat air tanah, namun kurang memiliki manfaat secara ekonomi. Tanaman produktif dan tanaman hias digunakan sebagai tanaman yang mampu bermanfaat secara ekonomi. Secara ekologi, tanaman produktif dan tanaman hias memiliki kualitas di bawah tanaman perintis.

Tabel 3 Variasi tanaman untuk reboisasi  
Table 3 Variations of plant types for reforestation

| Kawasan reboisasi ( <i>Reforestation area</i> ) | Jenis tanaman ( <i>Category of plants</i> )            |
|---|--|
| Lereng pegunungan                               | Tanaman perintis: ketapang, beringin, dan glodok tiang |
| Tepi jalan                                      | Tanaman perintis/hias: trembesi dan kenanga            |
| Sumber mata air                                 | Tanaman produktif: buah-buahan                         |
| Hutan lindung                                   | Tanaman perintis, produktif, dan hias                  |

Pembagian jenis tanaman merupakan strategi untuk mengajak masyarakat melakukan reboisasi. Alasan yang digunakan adalah bahwa kerusakan ekosistem daratan diakibatkan oleh permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, Sahabat Menanam mengupayakan penanaman yang bermanfaat secara ekonomi. Cara yang dilakukan Sahabat Menanam adalah memberikan dua jenis tanaman dalam setiap penanaman. Tanaman perintis sebagai tanaman wajib dan tanaman produktif atau tanaman hias sebagai pelengkap. Tujuannya, mengganti komoditas yang merusak hutan dengan komoditas tidak mengganggu fungsi hutan namun masih memiliki nilai ekonomi.

#### **4. Mengutamakan Proses Belajar Sosial**

Banyak hal yang dilalui dalam proses pemberdayaan masyarakat. Proses tersebut dilakukan sebagai sarana belajar sosial untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Kapasitas masyarakat menjadi penting karena masyarakat diposisikan sebagai subyek yang mampu melaksanakan upaya pembangunan secara mandiri. Menurut Soetomo (2011), proses pemberdayaan masyarakat dimulai dari identifikasi, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Hasil reboisasi belum terlihat hingga saat ini karena banyaknya kegagalan penanaman akibat faktor alam dan kesengajaan warga merusak. Kegagalan tersebut pada prosesnya mampu menjadi sarana masyarakat untuk belajar dan memperbaiki pelaksanaan pembangunan ekosistem daratan.

Berawal pada tahun 2015, masyarakat Pandanarum mulai resah dengan kerusakan lingkungan di wilayahnya. Kondisi desa terasa panas meskipun secara geografis wilayahnya cukup tinggi. Melalui Karang Taruna, masyarakat berkeinginan melakukan pembangunan ekosistem daratan tetapi tidak memiliki sumber daya. Kurangnya dukungan dari pemerintah desa menyebabkan Karang Taruna mencari cara untuk melakukan

pembangunan ekosistem daratan tanpa terkendala birokrasi.

Sahabat Menanam dikenal sebagai komunitas yang gemar menanam dan membagikan tanaman secara gratis. Mengetahui hal tersebut, anggota Karang Taruna mengunjungi Sahabat Menanam dan disepakati untuk melakukan pertemuan dengan warga Desa Pandanarum. Tujuannya untuk membahas permasalahan lingkungan secara bersama-sama. Diskusi dilakukan dalam forum yang biasa diselenggarakan masyarakat yaitu *slametan*.

Reboisasi pertama kali dilakukan di pinggir jalan Desa Pandanarum dengan menanam 300 pohon trembesi. Jenis trembesi dipilih karena sifatnya mengikat tanah dan membentuk peneduh. Sifat tanaman demikian mampu menjadi penahan angin, memperkuat jaringan tanah, dan mendeduhkan jalan. Jenis trembesi juga mampu menjadi penahan turunan air (*run off*) dari pegunungan ke dataran rendah. Selama ini, kondisi tersebut yang menjadikan Desa Pandanarum sebagai pemasok air banjir saat musim penghujan.

Bulan Juli 2016, Sahabat Menanam menyelenggarakan Program Sekolah Petani dengan menyewa kebun kakao milik warga. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan keberlanjutan masyarakat Pandanarum mengelola potensi di daerahnya. Program ini mengajarkan wirausaha yang berorientasi kelestarian lingkungan dengan cara bertani organik. Pertanian organik mampu meminimalkan pengeluaran dan meningkatkan hasil tanpa merusak tanah seperti bahan kimia.

Program Sekolah Petani hanya dilaksanakan selama satu kali masa panen. Terbatasnya SDM Sahabat Menanam menjadi alasan program ini tidak dilanjutkan. Meski demikian, hal tersebut tidak menjadi alasan terhentinya pembangunan ekosistem daratan. Pada tahun 2017 reboisasi tetap dilakukan sebagai wujud kesadaran masyarakat untuk membangun ekosistem



Sumber (Source): Dok. Sahabat Menanam, 2016

Gambar 2 Penyelenggaraan program Sekolah Petani  
*Figure 2 Implementation of farmer school program.*

pegunungan. Pemerintah desa mulai berpartisipasi secara langsung dalam upaya penanaman dengan memberikan anggaran kegiatan lingkungan kepada karang taruna. Salah satu upaya reboisasi dilakukan di Puthuk Jaya. Kawasan ini berada di lereng pegunungan yang minim vegetasi sehingga gersang dan rawan longsor. Tujuan penanaman di Puthuk Jaya adalah merehabilitasi lahan untuk menahan air pada saat hujan. Animo desa wisata membuat masyarakat ikut-ikutan untuk membangun desa wisata.

Masyarakat ingin mengembangkan Puthuk Jaya sebagai bumi perkemahan. Masyarakat melakukan reboisasi besar-besaran. Hal tersebut mengakibatkan kegagalan penanaman. Hampir semua tanaman yang ditanam sulit berkembang sampai sekarang. Kesalahan teknis penanaman menjadi penyebab terhambatnya pertumbuhan tanaman di Puthuk Jaya. Suhu panas akibat minimnya pohon peneduh menjadi penyebab utama.

Reboisasi dilanjutkan pada bulan April 2018. Dari hasil evaluasi, lokasi reboisasi dialihkan ke sumber mata air dengan tujuan untuk menjaga cadangan air tanah tetap lestari. Sumber mata air ini merupakan

sumber pengairan warga. Pohon buah-buahan dipilih karena selain mampu mengikat air tanah, juga dapat menghasilkan buah. Hasil penanaman di lokasi ini lebih terlihat dibandingkan di Puthuk Jaya. Faktor alam memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Kondisi sumber mata air yang teduh dan basah mendukung pertumbuhan tanaman.

Pada tahun 2019, Desa Pandanarum menerapkan mekanisme penanaman yang berbeda. Karang taruna sebagai penggerak utama mengalami kevakuman setelah reorganisasi pada akhir 2018. Pemerintah Desa Pandanarum kemudian secara langsung melaksanakan pembangunan ekosistem daratan melalui Program Adopsi Pohon. Pemerintah Desa Pandanarum selaku pengadopsi melakukan kerja sama penanaman dengan Sahabat Menanam. Penyediaan bibit dan perawatan dilakukan Sahabat Menanam dengan jaminan tanaman akan hidup. Pengadopsi mengganti biaya jasa pembibitan dan perawatan sesuai kesepakatan.

## 5. Pembagian Akses Kepada Masyarakat

Sahabat Menanam memiliki akses pengelolaan ekosistem daratan dari

pemerintah. Mereka meneruskan wewenang tersebut secara penuh kepada masyarakat melalui kader, yakni orang yang memiliki pengaruh di desa mitra Sahabat Menanam. Tujuannya, pengelolaan ekosistem daratan mampu dilakukan masyarakat sebagai aktor utama.

Kader meneruskan kepada masyarakat yang berkenan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan dan memberikan kepercayaan kepada kader sebagai penggerak masyarakat. Wewenang berupa perawatan, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil diberikan kepada kepala desa, karang taruna, dan LMDH. Sejauh ini Sahabat Menanam belum melihat hasil langsung penanaman karena wewenang tersebut dilakukan hanya sebatas pengecekan dan perawatan paska-tanam.

## **6. Menjaga Keberlanjutan Pembangunan**

Untuk mencapai keberlanjutan pembangunan ekosistem daratan, Sahabat Menanam mendorong kemandirian masyarakat. Intervensi dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui proses belajar sosial. Dengan cara tersebut, masyarakat mampu menemukan pola tindakan dalam upaya menyelesaikan masalah. Sebelum melakukan intervensi, Sahabat Menanam mengidentifikasi kesadaran dan pemahaman masyarakat. Hal itu bertujuan untuk melihat seberapa jauh inisiatif masyarakat dalam upaya penyelesaian masalah. Upaya intervensi disesuaikan dengan tingkat inisiatif masyarakat. Dengan demikian, pembangunan ekosistem daratan mampu dilakukan sejalan dengan masyarakat.

Sinergi antar-kelompok masyarakat dan dukungan pemerintah menjadi kunci keberlanjutan meskipun mengalami pasang surut dalam prosesnya. Salah satu penyebabnya adalah konflik organisasi karang taruna karena rekrutmen perangkat desa. Rekrutmen dianggap tidak

merepresentasikan aspirasi masyarakat, terutama karang taruna. Dampaknya, inisiatif Karang Taruna Pandanarum terhadap pembangunan ekosistem daratan menurun. Meskipun pembangunan ekosistem pegunungan masih berjalan namun inisiasi dan pembiayaan dilakukan oleh Pemerintah Desa Pandanarum. Hal tersebut didasari adanya pemahaman secara sinergis, ketika salah satu aktor tidak mampu maka aktor lain yang mengambil alih.

## **7. Terciptanya Kemandirian Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat berdampak pada perubahan kondisi masyarakat Desa Pandanarum. Dalam mekanisme pembangunan ekosistem daratan, masyarakat memiliki akses untuk membangun dan mengelola ekosistem daratan. Ada sinergi antara karang taruna, LMDH, dan pemerintah desa. Masyarakat juga pernah melakukan kesepakatan kerja sama dengan Perhutani melalui LMDH. Hal tersebut untuk memanfaatkan lahan hutan milik Perhutani dengan melakukan pengayaan lingkungan selain tanaman di hutan lindung dan hutan produksi. Kuatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kelestarian lingkungan berdampak pada peningkatan posisi tawar masyarakat. Pada tahun 2018, LMDH membatalkan alih fungsi lahan hutan untuk ditanami tebu oleh PTPN. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan pada masyarakat yang semula minim kepedulian terhadap kelestarian ekosistem daratan menjadi sadar pentingnya menjaga ekosistem daratan.

## **C. Kemandirian Masyarakat Melestarikan Ekosistem Daratan Turut Mendukung SDGs Poin 15**

Upaya Sahabat Menanam memberdayakan masyarakat Pandanarum secara tidak langsung menerapkan kegiatan yang mendukung tercapainya target SDGs Poin 15 tentang ekosistem daratan. Hal tersebut dijelaskan pada Tabel 4.

Tabel 4 Capaian pembangunan ekosistem daratan Desa Pandanarum terhadap target SDGs  
 Table 4 Achievement of Pandanarum Village land ecosystem development towards SDGs target

| Target SDGs ekosistem daratan<br>(Target of SDGs of terrestrial ecosystem) <sup>1)</sup>   | Capaian tahun 2019 (Achievement in 2019)   |
|--|--|
| <p>Pada tahun 2020, memastikan bahwa konservasi, restorasi, dan penggunaan yang berkelanjutan dari ekosistem terrestrial dan air daratan dan pelayanannya, khususnya hutan, rawa, pegunungan, dan daratan, sejalan dengan kewajiban di bawah perjanjian internasional</p> <p>Pada tahun 2030, memerangi desertifikasi, merestorasi lahan dan tanah terdegradasi, termasuk lahan yang kena dampak desertifikasi, kekeringan, banjir, dan berupaya untuk mencapai dunia yang terdegradasi secara netral</p> <p>Pada tahun 2020, mengenalkan upaya-upaya yang dapat mencegah pengenalan dan secara signifikan mengurangi dampak dari invasi spesies asing terhadap ekosistem tanah dan air yang dapat mengurangi jumlah spesies prioritas</p> <p>Pada tahun 2030, memastikan konservasi ekosistem daratan, termasuk keanekaragaman hayati, agar dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan manfaat yang esensial bagi pembangunan berkelanjutan</p> <p>Melakukan aksi segera dan signifikan untuk mengurangi degradasi natural habitat, menghambat hilangnya keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah kepunahan spesies terancam/langka</p> <p>Melakukan aksi segera untuk mengakhiri perburuan dan penjualan spesies flora dan fauna yang dilindungi dan mengatasi, baik penawaran maupun permintaan produk satwa liar ilegal</p> <p>Mendorong pembagian keuntungan yang adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetik dan mendukung akses yang layak terhadap sumber-sumber tersebut sebagaimana disepakati</p> <p>Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan lokal, proses pembangunan, dan strategi pengentasan kemiskinan</p> <p>Pada tahun 2020, mendukung pengimplementasian manajemen yang berkelanjutan untuk semua tipe hutan, menghambat deforestasi, merestorasi hutan terdegradasi, dan secara substansial meningkatkan aforestasi dan reforestasi secara global</p> | <p>– Pembangunan ekosistem daratan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>– Ada pendampingan kepada masyarakat dan kerja sama untuk mendukung keberlanjutan ekosistem daratan di pegunungan, hutan, dan sumber mata air</p> <p>– Reboisasi dilakukan di wilayah hutan lindung yang dimanfaatkan untuk budidaya tebu, jagung, dan yang menjadi tanah kosong</p> <p>– Reboisasi dilakukan di wilayah lereng pegunungan dan bukit untuk mengurangi risiko banjir</p> <p>Sahabat Menanam rutin melakukan sosialisasi, pendidikan lingkungan, dan gerakan sosial tentang upaya menyelesaikan permasalahan ekosistem daratan</p> <p>Upaya pemberdayaan sudah dilakukan untuk mencapai kemandirian masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan ekosistem daratan secara berkelanjutan</p> <p>Aksi nyata dilakukan masyarakat dan Sahabat Menanam melalui reboisasi di lahan-lahan kritis. Hal tersebut bertujuan mengembalikan habitat hewan seperti kera di hutan lindung Blitar Selatan.</p> <p>Upaya disinggung melalui pendidikan lingkungan. Untuk aksi secara langsung terkait flora dan fauna dilindungi belum pernah dilakukan.</p> <p>Kesepakatan kerja sama dilakukan LMDH dengan Perhutani untuk mengelola hutan. Ada pembagian hasil sesuai kesepakatan yang sudah dilakukan.</p> <p>Upaya pemberdayaan masyarakat oleh Sahabat Menanam mampu mengadvokasi pemerintah melakukan pembangunan ekosistem daratan multi aktor. Hal tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2017 tentang Gerakan Blitar Menanam</p> <p>Upaya yang dilakukan, khususnya di hutan, menerapkan perhutanan sosial dengan cara pengelolaan hutan secara berkelanjutan oleh pemerintah, Perhutani, dan LMDH</p> |

Sumber (Source): 1) Diolah dari (Bappenas, 2017).

Dalam prosesnya, pelestarian ekosistem daratan yang dilakukan masyarakat hingga tahun ini secara tidak langsung mendukung target SDGs Poin 15. Semua target SDGs Poin 15 sudah dilakukan oleh masyarakat, meskipun dalam beberapa aspek masih berproses.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Pembangunan ekosistem daratan tidak hanya merupakan tugas pemerintah karena ruang lingkup ekosistem daratan untuk kesejahteraan seluruh manusia. Meski memiliki sumber daya, pemerintah akan kewalahan apabila melakukan upaya secara sendiri dan terus-menerus. Perlu adanya peran aktor lain, terutama masyarakat untuk mendukung proses pembangunan ekosistem daratan. Tidak semua masyarakat sadar akan pentingnya menjaga ekosistem daratan. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mendukung tercapainya SDGs ekosistem daratan. Pemberdayaan masyarakat di Desa Pandanarum tidak secara langsung mengacu target SDGs, tetapi mampu mendorong masyarakat sebagai subjek pembangunan ekosistem daratan. Hal tersebut tidak lepas dari peran Sahabat Menanam selaku fasilitator yang menjadi penting karena mampu mendorong keberlanjutan pembangunan ekosistem daratan.

##### B. Saran

Pemerintah hendaknya melakukan upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendorong keberlanjutan pembangunan ekosistem daratan. Dengan cara ini, pemerintah dan masyarakat mampu memperoleh manfaat dari kelestarian ekosistem daratan. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan seperti program pemberdayaan berbasis lingkungan yang bernilai ekonomi. Tujuannya untuk mengajak masyarakat berkenan melestarikan lingkungan. Selain

itu, perlu juga dibuat kebijakan insentif untuk fasilitator pemberdayaan sebagai apresiasi karena fasilitator merupakan garda terdepan yang turut membantu pemerintah melakukan asertif ke masyarakat.

#### UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada Sahabat Menanam, warga Desa Pandanarum, Sarman (Wakil Kepala Administratur KPH Blitar), dan Krisna Triatmanto (Kepala DLH Kab. Blitar) yang telah mengizinkan terselenggaranya penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2017). *Metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia pilar pembangunan lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian PPN.
- Burchardt, T., Le Grand, J., & Piachaud, D. (2002). Introduction. In J. Hills, J. Le Grand, & D. Piachaud (Eds.), *Understanding social exclusion* (pp. 1–12). Oxford: Oxford University Press.
- Dishut Jatim. (2018). *Kehutanan dalam angka Provinsi Jawa Timur 2013-2017*. Surabaya: Dinas Kehutanan Jawa Timur.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Patilima, H. (2005). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, A. (2015). Gerakan sosial masyarakat peduli lingkungan. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 3(2), 175–184.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan masyarakat mungkinkah muncul antitesisnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suara.com. (2016). *Perhutani akui pesisir selatan Jatim sangat rawan pembalakan liar*. Diakses dari <https://www.suara.com/bisnis/2016/01/31/232017/perhutani-akui-pesisir-selatan-jatim-sangat-rawan-pembalakan-liar>.

- Subadi, T. (2006). *Metode penelitian kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian pendidikan: pendekatan, kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarno, J. (2016). “Gerakan Muncar Rumahku” dan strategi mobilisasi sumber daya pada gerakan sosial penyelamatan lingkungan. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 17–25.